

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Astawa, I Gde Panja dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia Edisi Pertama*. (Bandung: PT Alumni, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Fajar,Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang:Bayumedia Publishing, 2007).
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan Edisi Pertama*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Imami, Amriddin A Dajaan. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-6.(Jakarta: Kencana, 2010).
- Nugaraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. (Depok: Fakultas Hukum UI, 2007).
- Pudyatmoko, Y. Sri *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. (Jakarta: PT Grasindo, 2009).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. (Bandung: Alumni, 1981).
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke-13, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor)

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor).

## **C. Artikel-Artikel**

Ibnu Artadi. "Hukum". *Antara Nilai-Nilai Kemanfaatan, Kepastian dan Keadilan*, Edisi Oktober Tahun 2006.

Indah Cintia, dkk. "Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah".

[https://www.researchgate.net/publication/325473140\\_URGENSEI\\_SINKR](https://www.researchgate.net/publication/325473140_URGENSEI_SINKR)

ONISASI\_DAN\_HARMONISASI\_PERANCANGAN\_PERATURAN\_P  
ERUNDANG-  
UNDANGAN\_DAERAH\_OLEH\_INDAH\_CINTIA\_MADINAR\_HIMM  
AH\_A%27LA\_RUFAIDA, 1 Mei 2018.

Badan Pusat Statistik. “Sensus Penduduk 2010”.  
<https://sp2010.bps.go.id/index.php>, 11 februari 2019.

#### **D. Putusan**

Indonesia. *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks.*

#### **E. Skripsi dan Tesis**

Sayuna, Inche. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret (Tesis).

Widjaja, Haryanto. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemberian Izin Reklamasi Di Pantai Utara Jakarta Dilihat Dari Sudut Peraturan Perundang-Undangan. (Studi Kasus Reklamasi Pulau C, D Dan G Di Pantai Utara Jakarta*. Jakarta, Universitas Tarumanagara (Skripsi).